

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DISKOP
UKM**
PROV JATIM

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR

0025

Plan

- 1.
- 2.
- 3.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 3 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM | 4 |
| 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN | 8 |
| 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN | 8 |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 | 9 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH | 9 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH | 16 |
| 2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | 22 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD | 22 |
| 2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 35 |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 48 |
| 3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL | 48 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH | 52 |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN | 64 |
| 4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI | 64 |
| 4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH | 67 |
| BAB V PENUTUP | 69 |
| 5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN | 69 |
| 5.2 RENCANA TINDAK LANJUT | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun. Rencana kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2019 - 2024. Berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, renja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan rencana kerja dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana kerja. Adapun dalam tahap penyusunan ini berdasar pada RKPD dan rencana strategis (renstra) perubahan tahun 2019 - 2024 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Dalam penyusunan renja tahun 2023, telah dilakukan analisis evaluasi capaian pada tahun 2021 serta perkiraan capaian pada tahun berjalan 2022. Selain itu, juga telah melalui proses perencanaan dengan memperhatikan isu-isu strategis pemberdayaan koperasi dan UKM, baik di Jawa Timur maupun nasional.

Koperasi dan UMKM di Jawa Timur memegang peranan yang sangat penting dan menjadi basis pembangunan ekonomi kerakyatan. Kondisi ini ditunjukkan melalui jumlah koperasi yang mencapai lebih dari 22 ribu unit dan UMKM sebanyak 9,78 juta. Jumlah koperasi dan UMKM tersebut dapat menjadi potensi sekaligus ancaman bagi perekonomian Jawa Timur. Dikatakan demikian karena berkembang atau tidaknya koperasi dan UMKM tersebut akan berdampak pada perekonomian Jawa Timur dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Koperasi dan UKM melihat besarnya jumlah koperasi dan UMKM ini sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Selain itu, dengan terjadinya pandemic covid – 19 berpengaruh pada perekonomian dan mendorong terjadinya perubahan – perubahan pada masyarakat sehingga juga berdampak pada perubahan pola bisnis pada koperasi dan UMKM.

Strategi pemberdayaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat penting dengan berbagai isu strategis dan tantangan kedepan yang lebih kompleks. Tantangan kedepan diantaranya adalah tantangan digitalisasi di hampir semua aspek kehidupan, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap koperasi dan UMKM. Sehingga baik koperasi maupun UMKM harus mampu untuk berkompetisi dengan cara meningkatkan daya saingnya. Adapun peningkatan daya saing itu sendiri, selain dilihat dari aspek harga, juga dilihat dari sisi kualitas dan kreatifitas. Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, maka Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur fokus pada peningkatan produksi, pembiayaan, pemasaran, maupun peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pengelola koperasi UKM.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024;
26. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Seri E;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
29. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Timur;

30. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur;
31. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan untuk kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2023, yang merupakan penjabaran Perubahan Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019 - 2024 dan berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024. Sedangkan tujuannya adalah sebagai gambaran apa yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di Jawa Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dokumen rencana kerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan;

Bab II merupakan hasil evaluasi renja, baik yang telah dilaksanakan hingga tahun 2021 maupun rencana pencapaian tahun 2022;

Bab III Tujuan dan sasaran dari rencana kerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2023;

Bab IV berisi Rencana kerja dan pendanaan;

Bab V Penutup.

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2019 - 2024. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap RKPD.

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2019-2024. Adapun evaluasi renja tahun 2021 didasarkan dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan pencapaian Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2022 disajikan melalui tabel 2.1. di bawah ini :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Perkiraan Realisasi Capaian Renstra

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | |
|-----------------|---|---|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---|----------------|---------------------------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|--|----------------|--|-----|--|-----|
| | | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 2.17.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase indikator program yang tercapai | 100,00 % | | 0,00 | | 100,00 % | 39.467.667.456 | 0,00 | 6.300.841.140 | 0,00 | 9.344.296.820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.645.137.960 | 39.467.667.456 | | | | |
| | | Persentase realisasi anggaran | 100,00 % | | 0,00 | | 100,00 % | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | Indeks profesionalitas ASN | 75,00 % | | 0,00 | | 73,00 % | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran yang disusun | 16,00 Dokumen | | 0,00 | | 4,00 Dokumen | 1.858.890.000 | 0,00 | 295.683.287 | 0,00 | 359.123.941 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654.807.228 | 1.858.890.000 | | | | |
| 2.17.01.1.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | 7,00 dokumen | | 0,00 | | 7,00 dokumen | 716.745.022 | 0,00 | 175.673.387 | 0,00 | 179.972.447 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.645.834 | 716.745.022 | | | | |
| 2.17.01.1.02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Jumlah dokumen RKA | 1,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 7.563.442 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA Perubahan | 1,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 7.563.442 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA | 1,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 4.063.442 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah dokumen DPA Perubahan | 1,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 4.063.442 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen capaian kinerja | 5,00 Dokumen | | 0,00 | | 5,00 Dokumen | 1.089.990.210 | 0,00 | 120.009.900 | 0,00 | 172.587.994 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.597.894 | 1.089.990.210 | | | | |
| 2.17.01.1.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja | 4,00 Dokumen | | 0,00 | | 4,00 Dokumen | 28.901.000 | 1,00 | | 0,00 | 6.563.500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6.563.500 | 28.901.000 | | | | |
| 2.17.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | 3,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 26.408.928.000 | 0,00 | 3.891.185.406 | 0,00 | 6.182.365.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.073.550.558 | 26.408.928.000 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun | 12,00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | 12,00 Laporan | | 0,00 | | 12,00 Laporan | 25.110.656.000 | 3,00 | 3.653.838.746 | 3,00 | 5.830.358.273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 9.484.197.019 | 25.110.656.000 | | | | |
| 2.17.01.1.02.02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12,00 Laporan | | 0,00 | | 12,00 Laporan | 583.860.000 | 3,00 | 133.235.000 | 3,00 | 133.824.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 267.059.000 | 583.860.000 | | | | |
| 2.17.01.1.02.03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah laporan verifikasi penatausahaan | 12,00 Laporan | | 0,00 | | 12,00 Laporan | 634.152.268 | 3,00 | 97.657.810 | 3,00 | 213.529.099 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 311.186.909 | 634.152.268 | | | | |
| 2.17.01.1.02.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah | 12,00 Laporan | | 0,00 | | 12,00 Laporan | 7.509.478 | 3,00 | 1.811.400 | 3,00 | 200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 2.011.400 | 7.509.478 | | | | |
| 2.17.01.1.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah dokumen keuangan SKPD | 2,00 dokumen | | 0,00 | | 2,00 dokumen | 7.022.223 | 1,00 | 1.594.850 | 0,00 | 718.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2.312.850 | 7.022.223 | | | | |
| 2.17.01.1.02.06 | Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan atas LHP | Jumlah dokumen tanggapan atas LHP | 1,00 Dokumen | | 0,00 | | 1,00 Dokumen | 44.327.145 | 0,00 | 1.050.000 | 0,00 | 2.535.780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585.780 | 44.327.145 | | | | |
| 2.17.01.1.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah laporan keuangan | 12,00 Laporan | | 0,00 | | 12,00 Laporan | 17.201.847 | 3,00 | 1.997.600 | 3,00 | 1.200.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 3.197.600 | 17.201.847 | | | | |
| 2.17.01.1.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jumlah laporan prognosis | 1,00 Laporan | | 0,00 | | 1,00 Laporan | 4.199.039 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian | 8,00 Dokumen | | 0,00 | | 2,00 Dokumen | 1.888.817.749 | 0,00 | 439.703.527 | 0,00 | 474.264.696 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913.868.223 | 1.888.817.749 | | | | |
| 2.17.01.1.05.01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah sarana dan prasana yg terpenuhi | 1,00 Laporan | | 0,00 | | 1,00 Laporan | 167.903.399 | 0,00 | 66.212.883 | 0,00 | 800.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.012.883 | 167.903.399 | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | |
|-----------------|--|--|------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|---|---------------|---------------------------------|-------------|------|-------------|------|------|------|---------------|--|---------------|--|-----|--|-----|
| | | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 2.17.01.1.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah pengadaan pakaian dinas | 2.00 Paket | | 0,00 | | 2.00 Paket | 259.617.750 | 0,00 | 23.809.500 | 0,00 | 14.233.530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.043.030 | | 259.617.750 | | | |
| 2.17.01.1.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian | 12.00 Dokumen | | 0,00 | | 12.00 Dokumen | 970.501.600 | 3,00 | 145.838.557 | 3,00 | 265.519.830 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 411.358.387 | | 970.501.600 | | | | |
| 2.17.01.1.05.04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Laporan Data Pegawai | 1.00 Laporan | | 0,00 | | 1.00 Laporan | 142.850.000 | 0,00 | 78.134.044 | 0,00 | 40.391.336 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.525.380 | | 142.850.000 | | | | |
| 2.17.01.1.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1.00 Dokumen | | 0,00 | | 1.00 Dokumen | 347.945.000 | 0,00 | 125.708.543 | 0,00 | 153.320.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279.028.543 | | 347.945.000 | | | | |
| 2.17.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | 3.00 Dokumen | | 0,00 | | 1.00 Dokumen | 3.548.846.023 | 0,00 | 652.741.265 | 0,00 | 991.010.609 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.843.751.874 | | 3.548.846.023 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | 2.00 Dokumen | | 0,00 | | 0.00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.06.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 26.137.095 | 0,00 | 64.000 | 0,00 | 5.311.600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.375.600 | | 26.137.095 | | | | |
| 2.17.01.1.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah paket pengadaan | 2.00 Paket | | 0,00 | | 2.00 Paket | 818.984.155 | 0,00 | 288.356.525 | 0,00 | 200.147.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.503.668 | | 818.984.155 | | | | |
| | | Jumlah Paket Pengadaan | 2.00 Paket | | 0,00 | | 2.00 Paket | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 818.984.155 | | | | |
| 2.17.01.1.06.03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 293.402.999 | 0,00 | 29.067.840 | 0,00 | 186.944.930 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.012.770 | | 293.402.999 | | | | |
| 2.17.01.1.06.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 268.922.424 | 0,00 | 11.942.800 | 0,00 | 49.043.690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.986.490 | | 268.922.424 | | | | |
| 2.17.01.1.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 19.899.600 | 0,00 | 4.245.000 | 0,00 | 4.245.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.490.000 | | 19.899.600 | | | | |
| 2.17.01.1.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 113.763.250 | 0,00 | 330.600 | 0,00 | 41.565.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.895.700 | | 113.763.250 | | | | |
| 2.17.01.1.06.08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | jumlah paket pengadaan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 234.130.500 | 0,00 | 22.702.000 | 0,00 | 120.274.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.976.000 | | 234.130.500 | | | | |
| 2.17.01.1.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan | 1.00 Laporan | | 0,00 | | 1.00 Laporan | 1.773.606.000 | 0,00 | 296.032.500 | 0,00 | 383.479.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679.511.646 | | 1.773.606.000 | | | | |
| 2.17.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana | 3.00 Dokumen | | 0,00 | | 1.00 Dokumen | 282.650.000 | 0,00 | 274.553.632 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.553.632 | | 282.650.000 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | 2.00 Dokumen | | 0,00 | | 0.00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.07.07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | jumlah aset tetap lainnya yang diadakan | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 282.650.000 | 0,00 | 274.553.632 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.553.632 | | 282.650.000 | | | | |
| 2.17.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.00 Dokumen | | 0,00 | | 1.00 Dokumen | 4.042.159.908 | 0,00 | 617.729.760 | 0,00 | 948.784.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.566.513.903 | | 4.042.159.908 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | 2.00 Dokumen | | 0,00 | | 0.00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2.17.01.1.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah pengiriman dokumen | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 10.000.000 | 0,00 | 1.000.000 | 0,00 | 2.000.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000 | | 10.000.000 | | | | |
| 2.17.01.1.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12.00 Bulan | | 0,00 | | 12.00 Bulan | 1.064.505.146 | 3,00 | 205.988.450 | 3,00 | 218.082.594 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 424.071.044 | | 1.064.505.146 | | | | |
| 2.17.01.1.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1.00 Paket | | 0,00 | | 1.00 Paket | 108.951.000 | 0,00 | | 0,00 | 25.907.992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.907.992 | | 108.951.000 | | | | |
| 2.17.01.1.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | jumlah paket pelayanan umum Kantor | 2.00 Paket | | 0,00 | | 2.00 Paket | 2.858.703.762 | 0,00 | 410.741.310 | 0,00 | 702.793.557 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.534.867 | | 2.858.703.762 | | | | |
| | | Jumlah Jasa | 2.00 paket | | 0,00 | | 2.00 paket | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | |
|-----------------|--|--|------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|---|-------|---------------------------------|--------|-------------|------|------|------|------|------|--|---------------|--|-----|--|-----|
| | | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| 2.17.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara | 2.00 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 1.00 Dokumen | 1.437.375.776 | 0,00 | 129.244.263 | 0,00 | 388.748.279 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.992.542 | 1.437.375.776 | | | | |
| | | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawalan | 2.00 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0.00 Dokumen | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.01.1.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Jasa | 1.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 1.00 Paket | 217.100.000 | 0,00 | 43.160.308 | 0,00 | 42.222.469 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.382.777 | 217.100.000 | | | | |
| 2.17.01.1.09.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Jasa | 2.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 2.00 Paket | 230.842.926 | 0,00 | 46.463.263 | 0,00 | 52.586.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.049.370 | 230.842.926 | | | | |
| | | Jumlah Jasa | 2.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 2.00 Paket | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.01.1.09.06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 2.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 2.00 Paket | 291.080.000 | 0,00 | 15.740.000 | 0,00 | 41.313.450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.053.450 | 291.080.000 | | | | |
| | | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | 2.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 2.00 Paket | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.01.1.09.09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung yang dipelihara | 2.00 Paket | 0,00 | 0,00 | 2.00 Paket | 371.500.000 | 0,00 | 23.880.692 | 0,00 | 232.622.253 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256.502.945 | 371.500.000 | | | | |
| 2.17.01.1.09.10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarpras Gedung yang dipelihara | 1.00 paket | 0,00 | 0,00 | 1.00 paket | 326.852.850 | 0,00 | | 0,00 | 20.004.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.004.000 | 326.852.850 | | | | |
| | | Jumlah Sarpras Gedung yang dipelihara | 1.00 paket | 0,00 | 0,00 | 1.00 paket | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.02 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP | 88.00 % | 70,77 | 70,77 | 86.00 % | 1.200.000.000 | 0,00 | 107.767.750 | 0,00 | 248.248.001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.015.751 | 1.200.000.000 | | | | |
| | | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | 70.76 % | 0,00 | 0,00 | 0.00 % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.02.1.01 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi | 105.00 Unit | 270,00 | 270,00 | 150.00 Unit | 600.000.000 | 30,00 | 58.703.500 | 120,00 | 162.733.541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 221.437.041 | 600.000.000 | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana | 270.00 Unit | 0,00 | 0,00 | 0.00 Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.02.1.01.01 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam | 150.00 unit | 270,00 | 270,00 | 150.00 unit | 600.000.000 | 0,00 | 58.703.500 | 120,00 | 162.733.541 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 221.437.041 | 600.000.000 | | | |
| 2.17.02.1.02 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana | 270.00 Unit | 0,00 | 0,00 | 0.00 Unit | 600.000.000 | 0,00 | 49.064.250 | 0,00 | 85.514.460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.578.710 | 600.000.000 | | | | |
| | | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi | 100.00 % | 0,00 | 0,00 | 100.00 % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.02.1.02.01 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas | 300.00 unit | 0,00 | 0,00 | 300.00 unit | 600.000.000 | 0,00 | 49.064.250 | 120,00 | 85.514.460 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.578.710 | 600.000.000 | | | | |
| 2.17.03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Berkualitas | 64.00 % | 0,00 | 0,00 | 62.00 % | 1.589.370.411 | 0,00 | 138.208.275 | 0,00 | 343.099.988 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 481.308.263 | 1.589.370.411 | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|---|---------------|--------|---------------|------|------|------|------|--|--------|---|-----|--|-----|-------------------------------|-----|
| | | | (outcome) / Kegiatan (output) | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | 70.76 % | | 0,00 | | 0,00 % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.03.1.01 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi | 46.00 % | | 0,00 | | 44.00 % | 1.589.370.411 | 0,00 | 138.208.275 | 0,00 | 343.099.988 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 481.308.263 | | 1.589.370.411 | | | |
| | | Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan | 200,00 Unit | | 0,00 | | 0,00 Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1.589.370.411 | | | |
| 2.17.03.1.01.01 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas | 250,00 unit | | 0,00 | | 250,00 unit | 1.589.370.411 | 0,00 | 138.208.275 | 0,00 | 343.099.988 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 481.308.263 | | 1.589.370.411 | | | |
| 2.17.04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi sehat | 23.00 % | | 0,00 | | 21.00 % | 604.804.356 | 0,00 | 212.561.450 | 0,00 | 240.872.800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 453.434.250 | | 604.804.356 | | | |
| | | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | 70.76 % | | 0,00 | | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.04.1.01 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | 30.00 % | | 0,00 | | 25.00 % | 604.804.356 | 0,00 | 212.561.450 | 0,00 | 240.872.800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 453.434.250 | | 604.804.356 | | | |
| | | Jumlah KUKM yang dilakukan Pengawasan | 200,00 Unit | | 0,00 | | 0,00 Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 604.804.356 | | | |
| 2.17.04.1.01.01 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan | 125,00 unit | | 200,00 | | 125,00 unit | 604.804.356 | 0,00 | 212.561.450 | 120,00 | 240.872.800 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 453.434.250 | | 604.804.356 | | | |
| 2.17.05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | 97.00 % | | 0,00 | | 95.00 % | 4.215.285.867 | 0,00 | 744.632.003 | 0,00 | 977.029.634 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.721.661.637 | | 4.215.285.867 | | | |
| | | Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat | 96.00 % | | 0,00 | | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.05.1.01 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian | 33.00 % | | 0,00 | | 31.00 % | 3.156.251.487 | 0,00 | 672.654.595 | 1,00 | 907.060.472 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1.579.715.067 | | 3.156.251.487 | | | |
| | | Jumlah modul yang dihasilkan / diupdate | 1,00 Modul | | 0,00 | | 0,00 Modul | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Jumlah SDM Koperasi peserta pelatihan | 200,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| | | Jumlah SDM Koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya | 840,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.05.1.01.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan | 2,00 unit | | 0,00 | | 2,00 unit | 3.156.251.487 | 0,00 | 672.654.595 | 0,00 | 907.060.472 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.579.715.067 | | 3.156.251.487 | | | |
| | | Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian | 150,00 Orang | | 0,00 | | 100,00 Orang | | 0,00 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 50,00 | | | | | | |
| 2.17.05.1.02 | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 120,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 Orang | 1.059.034.380 | 0,00 | 71.977.408 | 0,00 | 69.969.162 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 141.946.570 | | 1.059.034.380 | | | |
| 2.17.05.1.02.01 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 360,00 orang | | 0,00 | | 360,00 orang | 1.059.034.380 | 150,00 | 71.977.408 | 0,00 | 69.969.162 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 150,00 | 141.946.570 | | 1.059.034.380 | | | |
| | | Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | 360,00 Orang | | 0,00 | | 360,00 Orang | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi | 70.00 % | | 0,00 | | 68.00 % | 15.238.083.560 | 0,00 | 1.514.487.403 | 0,00 | 4.140.801.714 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5.655.289.117 | | 15.238.083.560 | | | |
| | | Persentase Koperasi Berkinerja Baik | 70.76 % | | 0,00 | | 0,00 % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan PD | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | | | |
|-----------------|--|--|-------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------|---|---------------|------|---------------|------|------|------|------|--|---------------|---|----------------|--|-----|-------------------------------|--|
| | | | (outcome) / Kegiatan (output) | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| | | Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan | 5.25 % | | 0,00 | | 0.00 % | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | | Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina | 2.00 % | | 0,00 | | 0.00 % | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| 2.17.06.1.01 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | 30.00 % | | 0,00 | | 30.00 % | 15.238.083.560 | 0,00 | 1.514.487.403 | 0,00 | 4.140.801.714 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5.655.289.117 | | 15.238.083.560 | | | | |
| | | Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 26.00 % | | 0,00 | | 22.00 % | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan | 46.00 % | | 0,00 | | 42.00 % | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha | 32.00 % | | 0,00 | | 30.00 % | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan KUKM | 120.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang dikuatkan Penguatan Organisasi dan Tatalaksana | 270.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM | 390.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui pameran | 120.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah Koperasi yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan | 375.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan | 100.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usahanya | 425.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang dikuatkan usaha syariahnya | 375.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | 250.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang direstrukturisasi usahanya | 30.00 Unit | | 0,00 | | 0.00 Unit | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.17.06.1.01.01 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan | 50.00 unit | | 0,00 | | 50.00 unit | 9.327.385.202 | 0,00 | 679.611.264 | 0,00 | 2.750.288.868 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.429.900.132 | | 9.327.385.202 | | | | |
| 2.17.06.1.01.02 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya | 150.00 unit | | 0,00 | | 150.00 unit | 5.910.698.358 | 30,00 | 834.876.139 | 0,00 | 1.390.512.846 | 0,00 | | 0,00 | | 30,00 | 2.225.388.985 | | 5.910.698.358 | | | | |
| 2.17.07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UKM yang telah diberdayakan | 34.00 % | | 0,00 | | 31.00 % | 29.466.749.109 | 0,00 | 1.837.529.551 | 0,00 | 2.130.937.923 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.968.467.474 | | 29.466.749.109 | | | | |
| | | Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan | 5.25 % | | 0,00 | | 0.00 % | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |
| | | Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina | 2.00 % | | 0,00 | | 0.00 % | | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | | | |
|-----------------|--|---|-------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|---|-------|---------------|--------|---------------|------|------|------|--|------|---|---------------|--|----------------|-------------------------------|--|
| | | | (outcome) / Kegiatan (output) | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | | |
| 2.17.07.1.01 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan | 225.00 | Unit | 0,00 | | 50.00 | Unit | 29.466.749.109 | 0,00 | 1.837.529.551 | 0,00 | 2.130.937.923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.968.467.474 | 29.466.749.109 | | | |
| | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | 1050.00 | Unit | 0,00 | | 325.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan | 2160.00 | Unit | 0,00 | | 715.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha | 1045.00 | Unit | 0,00 | | 320.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM Terakses Informasi Perkoperasian dan UKM | 390.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang difasilitasi melalui sarana promosi produk K-UKM | 440.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah KUKM yang mengakses permodalan lembaga keuangan perbankan | 375.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah K-UKM yang difasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan non perbankan | 100.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah KUKM yang dikuatkan akses pembiayaannya | 950.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah KUKM yang dikuatkan usahanya | 1050.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah KUKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya | 30.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.17.07.1.01.01 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi | 175.00 | unit | 0,00 | | 175.00 | unit | 29.466.749.109 | 0,00 | 1.837.529.551 | 177,00 | 2.130.937.923 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 3.968.467.474 | 29.466.749.109 | | |
| 2.17.08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UKM yang telah dikembangkan | 34.00 | % | 0,00 | | 32.00 | % | 6.678.752.908 | 0,00 | 1.266.210.888 | 0,00 | 1.248.460.812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.671.700 | 6.678.752.908 | | | |
| | | Pertumbuhan omset K-UKM yang dipasarkan produknya | 0.00 | % | 0,00 | | 0.00 | % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Persentase peningkatan produksi Koperasi dan UKM yang dibina | 2.00 | % | 0,00 | | 0.00 | % | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.17.08.1.01 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | 450.00 | Unit | 0,00 | | 150.00 | Unit | 6.678.752.908 | 0,00 | 1.266.210.888 | 0,00 | 1.248.460.812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.671.700 | 6.678.752.908 | | | |
| | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM | 470.00 | Unit | 0,00 | | 220.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah UKM yang bermitra | 225.00 | Unit | 0,00 | | 70.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah UKM yang dikuatkan kualitas produksinya | 250.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah SDM UKM peserta pelatihan | 100.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran | 410.00 | Unit | 0,00 | | 0.00 | Unit | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2.17.08.1.01.01 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | 405.00 | unit | 0,00 | | 405.00 | unit | 6.678.752.908 | 75,00 | 1.266.210.888 | 200,00 | 1.248.460.812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 2.514.671.700 | 6.678.752.908 | | |

| Kode | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) | Target Renstra PD tahun 2024 | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD | | Target Kinerja dan Anggaran Renja PD | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran | |
|------|-------------------------------|---|------------------------------|-------|--------------------------------------|-----|---|-------|---------------------------------|-----|----|-------|-----|------|----|------|--|--------|--|-----|--|-----|
| | | | (Akhir Periode Renstra PD) | | s.d. Renja PD tahun lalu 2021 | | tahun berjalan yang dievaluasi Tahun 2022 | | I | | II | | III | | IV | | Renja PD yang dievaluasi Tahun 2022 | | tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2024) | | Renstra PD s/d Tahun 2022 (%) | |
| | | | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. | K | Rp. |
| | | Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan | 300,00 | Orang | 0,00 | | 300,00 | Orang | 250,00 | 0 | | 50,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 300,00 | | | | |

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berikut merupakan capaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur berdasar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun serta proyeksi capaian indikator kinerja utama pada tahun 2021 dan 2022 yang berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019 – 2024 dan perubahan Renstra.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi Jawa Timur

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD | TARGET NSPK | TARGET SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS | |
|----|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|-------------------|------|------|----------|------|------------------|--|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 |
| 1 | Pertumbuhan Koperasi Aktif (Persen) | - | - | - | Indikator Sasaran | % | 6 | | | | | | 6 | | | | | RPJMD Th. 2014 - 2019 dan Perubahannya |
| 2 | Jumlah Produk Koperasi dan UKM terstandarisasi (Produk) | - | - | - | Indikator Sasaran | Unit | 15 | | | | | | 46 | | | | | |
| 3 | Persentase pengajuan pembiayaan yang lulus | - | - | - | Indikator Sasaran | % | 60 | | | | | | 84 | | | | | |



| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD | TARGET NSPK | TARGET SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS | |
|----|--|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|-------|------|----------|------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | |
| | verifikasi (Persen) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kenaikan Volume Penjualan KUKM yang difasilitasi pemasarannya (Persen) | - | - | - | Indikator Sasaran | % | 5 | | | | | | 5,67 | | | | | | |
| 5 | Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas | - | - | - | LPPD | % | | | | | | | 58,82 | | | | | | |
| 6 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha | - | - | - | LPPD | % | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 7 | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha (Persen) | - | - | - | LPPD | % | | | | | | | 21,19 | | | | | | |
| 8 | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | - | - | - | LPPD | % | | | | | | | 100 | | | | | | |
| 9 | Persentase Pertumbuhan Nilai PDRB (Persen) | - | - | - | IKD | % | 5.501 | -3.5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 5,78 | -3,56 | 1,94 | 1,5 | 2,5 | RPJMD Th. 2019 - 2024 dan Perubahan 1 | |



| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD | TARGET NSPK | TARGET SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|----|---|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|----------|-------|------------------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 10 | Perkembangan Nilai Tambah Bruto KUKM (Rp) | - | - | - | IKU | Rp T | 8,6 | 3,43 | 3,5 | 3,75 | 3,8 | 4 | 6,3 | 2,57 | 4,39 | 3,75 | 3,8 | |
| 11 | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP | - | - | - | IKU | | 80,2 | 80,4 | 82,5 | 82,75 | 82,8 | 83 | 81,92 | 82,11 | 84,75 | 82,51 | 82,71 | |
| 12 | Persentase Indikator Program yang Tercapai (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 86 | 100 | 100 | |
| 13 | Persentase Realisasi Anggaran (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 96,85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 95,46 | 100 | 100 | |
| 14 | Indeks Profesionalitas ASN | - | - | - | Indikator Program | % | 85,78 | 87,78 | 88,78 | 89,78 | 90,78 | 91,78 | - | 87,78 | 72 | 73 | 74 | |
| 15 | Persentase Koperasi Berkinerja Baik (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 70,58 | 70,7 | 70,76 | 70,82 | 70,88 | 70,94 | - | 62,77 | 70,77 | | | |
| 16 | Pertumbuhan Omset K-UKM yang difasilitasi Pemasaran (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 4,02 | | | |
| 17 | Persentase K-UKM yang berhasil mengakses pembiayaan (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 4,5 | 5 | 5,25 | 5,5 | 5,75 | 6 | - | 26,36 | 5,88 | | | |
| 18 | Persentase Peningkatan Produksi Koperasi dan UKM yang dibina (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | -1,28 | 3,25 | | | |



| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD | TARGET NSPK | TARGET SPM | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | SATUAN | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | | | REALISASI CAPAIAN | | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|----|--|-------------|------------|------------|--------------------------|--------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------------|--------|------|----------|------|------------------|
| | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 19 | Persentase SDM K-UKM yang Bersertifikat (Persen) | - | - | - | Indikator Program | % | 93 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | - | 126,57 | 96 | | | |

Tabel di atas menunjukkan capaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 serta proyeksi tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2021 dan 2022, terdapat koreksi proyeksi target dari 8,85T dan 8,875T pada Renstra menjadi 3,5T dan 3,75T pada tahun 2021 dan 2022. Perubahan tersebut berdasar pada hasil proyeksi penghitungan nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM dengan mempertimbangkan koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2021 yang mengalami kontraksi akibat adanya pandemic *corona virus disease*.

Selanjutnya, di bawah ini merupakan tabel perkembangan koperasi di Jawa Timur Tahun 2019 – 2021. Data keragaan koperasi tersebut dapat dicermati melalui dari dua sisi, yaitu kuantitas dan kinerja usaha koperasi. Dari sisi kuantitas, Jumlah Koperasi di Jawa Timur per Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 36.417 unit, dengan koperasi aktif sebanyak 22.848 unit. Terdapat kenaikan koperasi aktif sebesar 1,77% jika dibandingkan dengan kondisi pada Triwulan IV Tahun 2020. Hal terdapat kenaikan yang sangat lambat dikarenakan dampak dari adanya aturan Kementerian Koperasi dan UKM RI terkait keaktifan koperasi. Seiring dengan revitalisasi koperasi yang dilakukan, Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/ Kota juga melakukan pemetaan kembali akan jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif sehingga terdapat 13.569 koperasi akan dilakukan pembinaan/restrukturisasi koperasi agar menjadi aktif kembali.

Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020, maka terjadi kenaikan 3,34 % jumlah koperasi dari 35.583 unit menjadi 36.417 unit selama satu tahun periode. Artinya terdapat pendirian 834 unit koperasi baru selama 1 tahun periode.

Tabel 0.1 Keragaan Koperasi di Jawa Timur

| No | Uraian | Satuan | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
|----|----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Total Koperasi | Unit | 33.863 | 35.583 | 36.417 |
| | Koperasi Aktif | Unit | 26.923 | 22.450 | 22.848 |
| | Koperasi Tdk Aktif | Unit | 6.868 | 13.133 | 13.569 |
| 2 | Koperasi bersertifikat | Unit | 3.917 | 10.493 | 13.245 |
| 3 | Usulan Pembubaran Koperasi | Unit | 2.444 | 2.114 | - |
| 3 | Anggota | Org/Kop | 4.611.091 | 3.925.385 | 3.820.616 |

| No | Uraian | Satuan | Th. 2019 | Th. 2020 | Th. 2021 |
|----|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| 4 | RAT | Kop | 13.199 | 13.357 | 11.126 |
| 5 | Manager | Orang | 2.615 | 2.681 | 2.222 |
| 6 | Karyawan | Orang | 60.717 | 177.915 | 146.342 |
| 7 | Modal Sendiri | Rp.000 | 13.501.533.935 | 14.073.006.896 | 20.841.516.203 |
| 8 | Modal Luar | Rp.000 | 16.145.080.106 | 14.571.593.288 | 24.595.689.632 |
| 9 | Total Asset | Rp.000 | 29.646.614.041 | 32.623.359.517 | 47.906.481.684 |
| 10 | Volume Usaha | Rp.000 | 43.773.743.300 | 34.920.954.707 | 32.560.604.622 |
| 11 | S H U | Rp.000 | 1.398.613.457 | 1.314.928.525 | 1.208.070.334 |

Untuk meningkatkan pemasaran produk-produk KUKM dan pengembangan jaringan serta networking KUKM Jawa Timur dilakukan fasilitasi promosi produk KUKM dengan mengikutsertakan produk KUKM ke dalam berbagai event pameran baik yang bersifat event regional, nasional maupun internasional. Pada Triwulan IV Tahun 2021, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur melalui pameran dalam negeri telah memfasilitasi 62 UKM untuk mengikuti 8 (delapan) event pameran. Dari keikutsertaan tersebut, total omset yang dihasilkan mencapai 186 Juta rupiah. Rata-rata omset pameran per UKM per event adalah sebesar 3 Juta rupiah. Nilai omset pameran berbeda-beda tergantung dari banyak stand yang difasilitasi dan lama pameran tersebut. Upaya perluasan akses pasar lainnya adalah misi dagang (Business-to-Business). yang mana di Pada tahun 2021, terdapat 3 (tiga) daerah tujuan misi dagang yaitu di Maluku Utara, Kepulauan Riau dan DKI Jakarta. Selain melalui pameran dan misi dagang, upaya fasilitasi pemasaran juga dilakukan melalui kemitraan baik dengan ritel modern, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), maupun dengan market place online (bukalapak, shopee, blibli), pada tahun 2021 telah difasilitasi 343 KUKM untuk bermitra dengan marketplace online tersebut. Sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas produk KUKM intervensi yang diberikan diantaranya juga dalam bentuk fasilitasi standarisasi KUKM dengan jenis standarisasi terdiri dari standarisasi halal, SNI, ISO dan merk.

Di bidang pembiayaan jumlah Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam/ Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi di Jawa Timur Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebanyak 16.223 unit atau sebesar 72.09% dari jumlah total koperasi di Jawa Timur. Keragaan KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi di Provinsi Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2020, maka terjadi peningkatan jumlah


KSP/USP/KJKS/UJKS-Koperasi dibanding data pada periode yang sama dari Triwulan IV 2020 ke Triwulan IV Tahun 2021 yaitu sebesar 3,32%. Sedangkan untuk jumlah anggota mengalami penurunan sebesar 2,67%. Hal ini karena semakin banyaknya koperasi yang tidak aktif. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota tidak menurunkan semangat pengurus untuk memajukan koperasi. Hal ini terlihat dari adanya pertumbuhan modal sendiri sebesar 48,1% pada tahun 2020 periode yang sama.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah, maka telah dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Koperasi dan UKM tahun 2019 – 2024 yang akan dilaksanakan setiap tahun adalah isu tentang daya saing Koperasi dan UKM di Jawa Timur yang belum maksimal.

Daya saing ini mencakup berbagai aspek, baik dari aspek kelembagaan, di mana Koperasi dan UKM perlu untuk ditingkatkan kualitas kelembagaannya agar memiliki posisi tawar lebih tinggi dalam perekonomian. Selanjutnya yaitu aspek produksi, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus mendukung Koperasi dan UKM untuk dapat meningkatkan produktivitasnya, baik melalui perluasan jaringan produksi, pengembangan produk dan usaha, revitalisasi usaha, maupun fasilitasi untuk standardisasi produk. Yang ketiga yaitu aspek pembiayaan, di mana Koperasi dan UKM perlu difasilitasi untuk dipertemukan dengan pihak – pihak yang menyediakan berbagai akses pembiayaan, baik lembaga bank maupun non bank serta didorong untuk memperkuat jaringan pembiayaan antar Koperasi agar lebih efisien. Yang keempat adalah aspek pemasaran, di mana Dinas Koperasi dan UKM harus dapat memperluas akses pemasaran produk Koperasi dan UKM, baik secara online maupun offline. Dan yang juga penting adalah aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi salah satu faktor penentu kecepatan berkembangnya Koperasi dan UKM.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP



Berdasarkan RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 2.4. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat banyak indikator program kegiatan yang tidak sesuai dengan uraian program kegiatan dalam rencana strategis. Indikator-indikator tersebut selanjutnya telah disesuaikan dalam kolom analisis kebutuhan. Hasil analisis kebutuhan tersebut merupakan usulan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

Tabel 2.4 Review terhadap RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|----------------------|--|------------|--|--------|------------------------|----------------|--|------------|--|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| 2.17.0.00.0.00.01.00 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 99.376.264.000 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | 99.526.264.000 | |
| 21702 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Jawa Timur | 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP | Persen | 87,00 | 1.228.968.000 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Jawa Timur | 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP | Persen | | | |
| 21702101 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi | Unit | 35,00 | 614.484.000 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi | Unit | | | |
| 2170210101 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam | Unit | 170,00 | 614.484.000 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan usaha simpan pinjam | Unit | | | |
| 21702102 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi | Persen | 100,00 | 614.484.000 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi | Persen | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|--------|------------------------|----------------|--|------------|---|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| 2170210201 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas | Unit | 320,00 | 614.484.000 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi perijinan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas | Unit | | | |
| 21703 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase Koperasi yang Berkualitas | Persen | 63,00 | 995.000.000 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase Koperasi yang Berkualitas | Persen | | | |
| 21703101 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi | Persen | 45,00 | 995.000.000 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi | Persen | | | |
| 2170310101 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas | Unit | 315,00 | 995.000.000 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi peningkatan akuntabilitas | Unit | | | |
| 21704 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi sehat | Persen | 22,00 | 765.000.000 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi sehat | Persen | | | |
| 21704101 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya | Jawa Timur | 1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | Persen | 27,00 | 765.000.000 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah | Jawa Timur | 1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | Persen | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|--------|------------------------|----------------|--|------------|---|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| | Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | | | | |
| 2170410101 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan | Unit | 130,00 | 765.000.000 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jawa Timur | 1 Jumlah Koperasi yang difasilitasi penilaian kesehatan | Unit | | | |
| 21705 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | Persen | 96,00 | 673.200.000 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | Persen | | | |
| 21705101 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian | Persen | 32,00 | 673.200.000 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian | Persen | | | |
| 2170510101 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jawa Timur | 1 Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan | Unit | 1,00 | 673.200.000 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jawa Timur | 1 Jumlah modul atau media pelatihan yang dikembangkan atau dihasilkan | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 2 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian | Orang | 210,00 | 673.200.000 | | Jawa Timur | 2 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi melalui pelatihan perkoperasian | Orang | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM | Orang | | | | Jawa Timur | 3 Jumlah SDM Koperasi yang difasilitasi peningkatan kapasitas SDM | Orang | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|--------|------------------------|----------------|--|------------|---|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| 21705102 | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | |
| 2170510201 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jawa Timur | 1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | Jawa Timur | 1 Jumlah SDM UKM yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | |
| 21706 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi | Persen | 69,00 | 22.725.000.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Jawa Timur | 1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi | Persen | | | |
| 21706101 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | Persen | 30,00 | 22.725.000.000 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | 1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | Persen | | | |
| | | Jawa Timur | 2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | Persen | 24,00 | 22.725.000.000 | | Jawa Timur | 2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | Persen | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan | Persen | 44,00 | 22.725.000.000 | | Jawa Timur | 3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan | Persen | | | |
| | | Jawa Timur | 4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha | Persen | 31,00 | 22.725.000.000 | | Jawa Timur | 4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha | Persen | | | |
| 2170610101 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jawa Timur | 1 Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya | Unit | 1.230,00 | 17.170.000.000 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jawa Timur | 1 Jumlah KSP/USP-Koperasi dan KSP-PS/USP-PS Koperasi yang difasilitasi penguatan usahanya | Unit | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|--|--------|------------------------|----------------|--|------------|--|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| | | Jawa Timur | 2 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan | Unit | 170,00 | 17.170.000.000 | | Jawa Timur | 2 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses permodalan | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan | Unit | | 17.170.000.000 | | Jawa Timur | 3 Jumlah Koperasi yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran dan kewirausahaan | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 4 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya | Unit | 212,00 | 17.170.000.000 | | Jawa Timur | 4 Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk direstrukturisasi usahanya | Unit | | | |
| 2170610102 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jawa Timur | 1 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan | Unit | 680,00 | 5.555.000.000 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jawa Timur | 1 Jumlah koperasi yang difasilitasi penguatan akses pembiayaan | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi | Unit | 50,00 | 5.555.000.000 | | Jawa Timur | 2 Jumlah Koperasi yang difasilitasi akses promosi | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya | Unit | 85,00 | 5.555.000.000 | | Jawa Timur | 3 Jumlah koperasi yang difasilitasi peningkatan kualitas produksinya | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 4 Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya | Unit | 120,00 | 5.555.000.000 | | Jawa Timur | 4 Jumlah Koperasi yang dikuatkan kelembagaannya | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 5 Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian | Unit | 210,00 | 5.555.000.000 | | Jawa Timur | 5 Jumlah koperasi yang terakses informasi perkoperasian | Unit | | | |
| 21707 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, | Jawa Timur | 1 Persentase UKM yang telah diberdayakan | Persen | 33,00 | 19.809.325.000 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, | Jawa Timur | 1 Persentase UKM yang telah diberdayakan | Persen | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | | |
|------------|--|------------|---|---|------------------------|----------------|--|--|---|--------|---|---------------------|-----------------|--|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting | |
| | USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | | | | | | |
| 21707101 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jawa Timur | 1 | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas legalitas kelembagaan | Unit | 75,00 | 19.809.325.000 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jawa Timur | 1 | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas legalitas kelembagaan | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 2 | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran | Unit | 350,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 2 | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 3 | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan | Unit | 720,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 3 | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitas pembiayaan | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 4 | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas penguatan usaha | Unit | 350,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 4 | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitas penguatan usaha | Unit | | |
| 2170710101 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jawa Timur | 1 | Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM | Unit | 250,00 | 19.809.325.000 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jawa Timur | 1 | Jumlah UKM yang terakses informasi kelembagaan UKM | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 2 | Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi | Unit | 180,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 2 | Jumlah UKM yang difasilitasi akses promosi | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 3 | Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan | Unit | 390,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 3 | Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan akses permodalan | Unit | | |
| | | Jawa Timur | 4 | Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan | Unit | 430,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 4 | Jumlah UKM yang difasilitasi penguatan | Unit | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|--------|------------------------|----------------|--|------------|---|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| | | | akses pembiayaan | | | | | | akses pembiayaan | | | | |
| | | Jawa Timur | 5 Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha | Unit | 1.100,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 5 Jumlah UKM yang difasilitasi pengembangan usaha | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 6 Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya | Unit | 650,00 | 19.809.325.000 | | Jawa Timur | 6 Jumlah UKM yang difasilitasi restrukturisasi usahanya | Unit | | | |
| 21708 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jawa Timur | 1 Persentase UKM yang telah dikembangkan | Persen | 33,00 | 6.363.000.000 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Jawa Timur | 1 Persentase UKM yang telah dikembangkan | Persen | | | |
| 21708101 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jawa Timur | 1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Unit | 150,00 | 6.363.000.000 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jawa Timur | 1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM | Unit | | 6.363.000.000 | | Jawa Timur | 2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Jumlah UKM yang bermitra | Unit | | 6.363.000.000 | | Jawa Timur | 3 Jumlah UKM yang bermitra | Unit | | | |
| 2170810101 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jawa Timur | 1 Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | Unit | 600,00 | 6.363.000.000 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jawa Timur | 1 Jumlah UKM yang ditingkatkan kualitas produksinya | Unit | | | |
| | | Jawa Timur | 2 Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan | Orang | 200,00 | 6.363.000.000 | | Jawa Timur | 2 Jumlah SDM UKM yang difasilitasi melalui pelatihan | Orang | | | |
| | | Jawa Timur | 3 Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran | UKM | 210,00 | 6.363.000.000 | | Jawa Timur | 3 Jumlah UKM yang dikuatkan jaringan pemasaran | UKM | | | |
| | | Jawa Timur | 4 Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran | Unit | 180,00 | 6.363.000.000 | | Jawa Timur | 4 Jumlah UKM yang difasilitasi dalam penyediaan informasi pemasaran | Unit | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|--|------------------------|----------------|--|--|---|--------|--|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| | | | dan kewirausahaan | | | | | | dan kewirausahaan | | | | |
| XXX01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jawa Timur | 1 | Persentase indikator program yang tercapai | persen | 100,00 | 38.703.474.800 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Jawa Timur | 1 | Persentase indikator program yang tercapai | persen | |
| | | Jawa Timur | 2 | Persentase realisasi anggaran | persen | 100,00 | 38.703.474.800 | | Jawa Timur | 2 | Persentase realisasi anggaran | persen | |
| | | Jawa Timur | 3 | Indeks profesionalitas ASN | persen | 74,00 | 38.703.474.800 | | Jawa Timur | 3 | Indeks profesionalitas ASN | persen | |
| XXX01101 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | Dokumen | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | Dokumen | |
| | | Jawa Timur | 2 | Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah | Dokumen | | | | Jawa Timur | 2 | Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah | Dokumen | |
| XXX0110101 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | 4,00 | 712.470.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah | Dokumen | |
| XXX0110102 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen RKA | Dokumen | 1,00 | 12.036.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen RKA | Dokumen | |
| XXX0110103 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen RKA Perubahan | Dokumen | 1,00 | 8.568.000 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen RKA Perubahan | Dokumen | |
| XXX0110104 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen DPA | Dokumen | 1,00 | 6.120.000 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen DPA | Dokumen | |
| XXX0110105 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen DPA Perubahan | Dokumen | 1,00 | 6.120.000 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen DPA Perubahan | Dokumen | |
| XXX0110106 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen capaian kinerja | Dokumen | 5,00 | 753.296.700 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen capaian kinerja | Dokumen | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|---|------------|---|---|------------------------|----------------|--|---|---|--------|---|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| | Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | |
| XXX0110107 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | Dokumen | 5,00 | 38.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen evaluasi yang disusun | Dokumen | |
| XXX01102 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | Dokumen | 1,00 | 29.125.434.000 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | Dokumen | |
| XXX0110201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jawa Timur | 1 | jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | laporan | 12,00 | 27.941.241.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jawa Timur | 1 | jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan | laporan | |
| XXX0110202 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jawa Timur | 1 | jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | 12,00 | 603.800.000 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jawa Timur | 1 | jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Laporan | |
| XXX0110203 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan verifikasi penatausahaan | Laporan | 12,00 | 531.000.000 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan verifikasi penatausahaan | Laporan | |
| XXX0110204 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah | Laporan | 12,00 | 12.120.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah | Laporan | |
| XXX0110205 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen keuangan SKPD | Dokumen | 12,00 | 3.030.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah dokumen keuangan SKPD | Dokumen | |
| XXX0110206 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jawa Timur | 1 | jumlah dokumen tanggapan atas LHP | Dokumen | 1,00 | 17.719.000 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jawa Timur | 1 | jumlah dokumen tanggapan atas LHP | Dokumen | |
| XXX0110207 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan keuangan | Laporan | 12,00 | 13.534.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan keuangan | Laporan | |
| XXX0110208 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan prognosis | Laporan | 1,00 | 2.990.000 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jawa Timur | 1 | Jumlah laporan prognosis | Laporan | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|--|---------|------------------------|----------------|--|------------|--|---------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| XXX01105 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian | Dokumen | 2,00 | 1.799.520.500 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian | Dokumen | | | |
| XXX0110501 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jawa Timur | 1 Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi | Laporan | 1,00 | 129.150.000 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jawa Timur | 1 Jumlah sarana dan prasarana yg tepenuhi | Laporan | | | |
| XXX0110502 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jawa Timur | 1 jumlah pengadaan pakaian dinas | Paket | 2,00 | 187.809.500 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jawa Timur | 1 jumlah pengadaan pakaian dinas | Paket | | | |
| XXX0110503 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian | Laporan | 1,00 | 1.121.366.000 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian | Laporan | | | |
| XXX0110504 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan data pegawai | Laporan | | 88.195.000 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan data pegawai | Laporan | | | |
| XXX0110509 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Laporan | 1,00 | 273.000.000 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Laporan | | | |
| XXX01106 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | dokumen | 1,00 | 1.123.990.600 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | dokumen | | | |
| XXX0110601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 27.189.000 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 2,00 | 297.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110603 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 27.270.000 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 192.000.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|--|------------|---|---------|------------------------|----------------|--|------------|---|---------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| XXX0110606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 20.000.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110607 | Penyediaan Bahan/Material | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 7.752.000 | Penyediaan Bahan/Material | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110608 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | 1,00 | 82.779.600 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jawa Timur | 1 jumlah paket pengadaan | Paket | | | |
| XXX0110609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jawa Timur | 1 Jumlah Laporan | Laporan | 1,00 | 470.000.000 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jawa Timur | 1 Jumlah Laporan | Laporan | | | |
| XXX01108 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | 1,00 | 4.042.919.000 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jawa Timur | 1 Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Dokumen | | | |
| XXX0110801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jawa Timur | 1 Jumlah pengiriman dokumen | Paket | 1,00 | 10.403.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jawa Timur | 1 Jumlah pengiriman dokumen | Paket | | | |
| XXX0110802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jawa Timur | 1 Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12,00 | 1.278.660.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jawa Timur | 1 Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | | | |
| XXX0110803 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | 1,00 | 71.710.000 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | | | |
| XXX0110804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | 2,00 | 2.682.146.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | | | |
| XXX01109 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jawa Timur | 1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara | dokumen | 1,00 | 1.075.000.000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jawa Timur | 1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara | dokumen | | | |
| XXX0110901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | 1,00 | 189.500.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | Paket | | | |

| RKPD | | | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan (RKPD) | | | | | | |
|------------|---|------------|--|--------|------------------------|----------------|---|------------|--|--------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Kode | Daerah Dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Pagu Indikatif | Daerah Dan Program/Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana (Rp) | Catatan Penting |
| XXX0110902 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | paket | 2,00 | 273.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jawa Timur | 1 Jumlah Jasa | paket | | | |
| XXX0110906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jawa Timur | 1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Paket | 2,00 | 186.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jawa Timur | 1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara | Paket | | | |
| XXX0110909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jawa Timur | 1 Jumlah Gedung yang dipelihara | Paket | 2,00 | 426.500.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jawa Timur | 1 Jumlah Gedung yang dipelihara | Paket | | | |

2.5 PENELAHAH USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur adalah hasil telaah terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi dan perguruan tinggi.

Pada tabel 2.5 berisi usulan – usulan Kabupaten Kota yang telah dibahas saat desk musrenbang untuk RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 dan diakomodir pada batasan keikutsertaan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran. Sedangkan pada tabel 2.6.

Tabel 2.5

Usulan Kabupaten Kota Hasil Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2023 yang diakomodir

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|---------------------|--|---|---|--|
| 1 | Kabupaten Bangkalan | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Kurang optimalnya peran pengawasan koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 2 | Kabupaten Bangkalan | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI | Masih minimnya produk koperasi yang bersertifikat | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 3 | Kabupaten Bangkalan | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | Masih minimnya produk UKM yang bersertifikat | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 4 | Kabupaten Bangkalan | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI | Masih minimnya produk koperasi yang mendaftarkan/mempunyai hak merk | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 5 | Kabupaten Bangkalan | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Masih minimnya produk UKM yang mendaftarkan/mempunyai hak merk | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 6 | Kabupaten Blitar | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | BP Blmtek Koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |
| 7 | Kabupaten Blitar | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI | BP Fasilitasi merk Produk Koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |
| 8 | Kabupaten Blitar | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI | Sertifikasi Produk Koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |
| 9 | Kabupaten Bondowoso | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Masih banyak produk UKM yang belum terstandarisasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|---------------------|--|--|---|--|
| 10 | Kabupaten Bondowoso | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Masih minimnya wawasan dan kemampuan SDM UKM dalam pengembangan usaha | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |
| 12 | Kabupaten Jombang | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Kegiatan pengawasan untuk koperasi yang anggotanya lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi belum bisa dilaksanakan secara maksimal | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | usulan untuk 6 orang peserta (Koperasi) minimal, RAB perlu disesuaikan di SIPD. dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran. |
| 13 | Kabupaten Jombang | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI KOPERASI | Keterbatasan KUKM dalam mengakses dana untuk penguatan permodalan dan pengembangan usaha | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diajukan melalui sistem aplikasi pengajuan dagulir. |
| 23 | Kabupaten Lumajang | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Bimtek pengawasan koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | Diakomodir sebagai peserta dan sesuai kewenangan provinsi dan ketersediaan anggaran |
| 24 | Kabupaten Lumajang | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | pendampingan akses pembiayaan formal (perbankan) bagi koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | Diakomodir sebagai peserta dan sesuai kewenangan provinsi dan ketersediaan anggaran, agar usulan disesuaikan kembali. Bisa juga diakses pada aplikasi SAPDA/ melalui website dinas koperasi dan UKM Prov. Jatim |
| 26 | Kabupaten Madiun | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Kurangnya tenaga pengawas dan pemeriksa koperasi yang berkompentensi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada untuk jumlah pesertanya |
| 27 | Kabupaten Madiun | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | masih banyak ukm yang belum mendaftarkan merek | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|-------------------|--|--|---|---|
| 28 | Kabupaten Madiun | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | SDM UKM yang belum terlatih terkait standart manajerial | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 31 | Kabupaten Magetan | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Perlunya Bimbingan teknis untuk koperasi cabang yang ada di kabupaten Magetan | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 32 | Kabupaten Magetan | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Perlunya Kemitraan dengan Toko Modern | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 33 | Kabupaten Magetan | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Perlunya Pelatihan Packaging bagi SDM UKM | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 34 | Kabupaten Magetan | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Perlunya Pelatihan Produk tahu dan pengadaan alat produksi tahu | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 35 | Kabupaten Magetan | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Perlunya Pelatihan aneka minuman dan pengadaan Both, sealer cup, dll) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 36 | Kabupaten Malang | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Rumah Kurasi Bagi UMKM | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |
| 37 | Kabupaten Malang | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Penguatan Kualitas Produk Melalui : Bimtek Packaging, Fasilitasi Legalitas Merk, Fasilitasi Legalitas Halal | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran. permasalahan dan usulan untuk disesuaikan kembali |
| 38 | Kabupaten Malang | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Banyaknya koperasi binaan prov di kabupaten belum dilakukan bimbingan teknis tentang pengawasan sesuai perdep no 15 tahun 2021 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan menyesuaikan ketersediaan anggaran |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|------------------------|---|---|--|---|
| 39 | Kabupaten Malang | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Penguatan Kualitas Pruduk Melalui Bimtek Packaging Fasilitasi Legalitas Merek | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta |
| 41 | Kabupaten Ngawi | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | Sertifikasi produk UKM | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 42 | Kabupaten Ngawi | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Pembiayaan HAKi/Merk produk UKM | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 43 | Kabupaten Ngawi | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | E-commerce dan packaging | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 44 | Kabupaten Ngawi | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Pelatihan bagi SDM Pengelola Koperasi dan UKM | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 45 | Kabupaten Pacitan | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | Banyak produk UMKM di Pacitan yang belum bersertifikat halal | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 46 | Kabupaten Pacitan | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Keterbatasan jaringan pemasaran dan keterbatasan sumber daya untuk memperluas pasar | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 47 | Kabupaten Pacitan | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | kurangnya pemahaman pelaku UMKM dalam menyiapkan Rencana bisnis yang efektif yang dapat membantu meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bagi wirausahawan yang inovatif | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada. bisa diakses website SIJAWARA |
| 48 | Kabupaten Pacitan | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Banyak UMKM yang belum memiliki izin usaha yang resmi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada (sebaiknya merk yang sudah siap) |
| 49 | Kabupaten Pamekasan | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Masih rendahnya sistem manajemen UKM | Disetujui dan dilanjutkan | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan menyesuaikan ketersediaan |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|-----------------------|--|--|---|--|
| | | | | pembahasan TAPD | anggaran. dapat mengakses pelatihan secara online juga melalui website SIJAWARA |
| 51 | Kabupaten Ponorogo | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Sering Terjadi Kecurangan dari karyawan yang merugikan koperasi Rp. 100.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 52 | Kabupaten Ponorogo | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI | Produk tidak bisa dipasarkan skala luas karena belum lengkap Ijin edarnya baik Halal maupun BPOM Rp. 350.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 53 | Kabupaten Ponorogo | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI | Produk tidak bisa dipasarkan skala luas karena Merk belum terdaftar, selain itu Merk menjadi syarat produk untuk mengurus BPOM Rp. 100.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 54 | Kabupaten Ponorogo | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | BELUM TERSEDIANYA SERTIFIKASI PRODUK UKM Rp. 325.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 61 | Kabupaten Probolinggo | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Minimnya Pengetahuan tentang pemasaran Kopi Secara Online | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta |
| 62 | Kabupaten Sidoarjo | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI KOPERASI | Banyak koperasi yang membutuhkan modal tambahan koperasi, namun beberapa koperasi tidak mengetahui mekanismenya | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | pengajuan dagulir bisa melalui sistem aplikasi pengajuan dagulir |
| 63 | Kabupaten Sidoarjo | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | Mamberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar mendapatkan legalitas untuk usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memiliki Legalitas Usaha" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|---------------------|---|--|---|---|
| 64 | Kabupaten Sidoarjo | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar mendapatkan legalitas untuk usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memiliki Legalitas Usaha" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 65 | Kabupaten Sidoarjo | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Memanfaatkan teknologi informasi di bidang pemasaran" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 66 | Kabupaten Sidoarjo | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Memberikan fasilitas kepada Usaha Mikro agar dapat mengembangkan usahanya. Mendukung salah satu program prioritas yaitu Usaha Mikro naik kelas yang salah satu kriterianya adalah "Mengikuti kegiatan pelatihan dan bersertifikat" (SK Kepala Dinas tentang Ketentuan Usaha Mikro Naik Kelas, RPJMD 2021-2016) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi (UKM) dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 67 | Kabupaten Situbondo | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Masih lemahnya Jaringan Pemasaran/kemitraan produk UKM di Kabupaten Situbondo Volume: 50 Orang Rp. 150.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 68 | Kabupaten Situbondo | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Masih Lemahnya Manajerial SDM UKM kab. situbondo Volume: 50 Orang Rp. 150.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 69 | Kabupaten Sumenep | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | Keberadaan UKM yang membutuhkan penguatan modal (100 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada. bisa diakses juga melalui aplikasi SAPDA |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|-------------------|--|--|---|---|
| 70 | Kabupaten Sumenep | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | Produk ukm membutuhkan sertifikasi halal dan perijinan untuk memperluas pemasaran (50 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 71 | Kabupaten Sumenep | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK KOPERASI | Produk UKM banyak yang belum memperoleh legalitas merek dalam memasuki pangsa pasar yang lebih luas (50 merek) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 72 | Kabupaten Sumenep | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Banyaknya produk UMKM yang belum mendapatkan akses pasar dari pengusaha retail (100 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 73 | Kabupaten Sumenep | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Beberapa UKM membutuhkan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan manajerial (100 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 81 | Kabupaten Tuban | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI | Produk koperasi yang belum standart nasional | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 82 | Kabupaten Tuban | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Produk koperasi yang belum memiliki daya saing | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 83 | Kabupaten Tuban | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | masih banyaknya pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan untuk mengakses permodalan (perbankan) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 84 | Kabupaten Tuban | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Banyaknya produk UMKM yang belum memenuhi Standart Kualitas mutu Produk | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 85 | Kabupaten Tuban | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Banyaknya Produk Usaha mikro yang belum terdaftar merk nya | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|-----------------------|--|--|---|--|
| 86 | Kabupaten Tulungagung | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | 1. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang masih belum memahami peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian 2. Masih banyaknya pengurus/pengelola koperasi yang masih belum memahami tentang manajemen akuntansi perkoperasian 3. Jumlah koperasi yang diawasi dan diperiksa di Kab Tulungagung terlalu banyak, sehingga dalam 1 kegiatan belum dapat mengcover semua koperasi | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran |
| 87 | Kabupaten Tulungagung | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Masih banyaknya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang belum memiliki merek dagang yang dipatenkan | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran |
| 88 | Kabupaten Tulungagung | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | Masih minimnya pelaku usaha koperasi dan usaha mikro yang memerlukan akses pembiayaan untuk permodalan | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran. pembiayaan bisa diakses melalui sistem aplikasi e-financing SAPDA |
| 89 | Kabupaten Tulungagung | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha Mikro cara memasarkan produknya | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran |
| 90 | Kabupaten Tulungagung | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Masih minimnya pengetahuan pelaku usaha mikro tentang mengelola usahanya dengan benar | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir untuk difasilitasi apabila sesuai kewenangan dan ada ketersediaan anggaran. dapat juga diakses melalui aplikasi SIJAWARA |
| 97 | Kota Kediri | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | perlu akses pembiayaan formal | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta dan menyesuaikan ketersediaan anggaran. akses pembiayaan/dagulir juga dapat diakses melalui aplikasi SAPDA |
| 98 | Kota Madiun | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Pengajuan Pelatihan Vokasional bagi Usaha Mikro di Kota Madiun, dengan nilai Rp. 90.000.000 | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada. |

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|-----|------------------|--|--|---|--|
| 99 | Kota Madiun | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK KOPERASI | Pengajuan Bimtek Pengembangan Jenis Usaha Koperasi dan Digitalisasi Produk | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | isa diakomodir sebagai peserta sesuai kewenangan provinsi dan memperhatikan anggaran yang ada |
| 105 | Kota Probolinggo | #BP PELATIHAN MANAJERIAL BAGI SDM UKM | Masih kurangnya pelaku usaha yang memiliki ketrampilan manajerial untuk peningkatan usahanya (100 orang) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 106 | Kota Probolinggo | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | Masih banyak pelaku usaha yang dianggap belum bankable dan terakses dengan pembiayaan formal (100 orang) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 107 | Kota Probolinggo | #BP Bimbingan Teknis Pengawasan Koperasi yang anggotanya lintas kabupaten / kota dalam satu provinsi | Masih belum optimalnya SDM Koperasi yang memahami teknis pengawasan koperasi (100 koperasi) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 108 | Kota Probolinggo | #BP FASILITASI PENDAFTARAN MEREK PRODUK UKM | Masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk untuk daya saing usaha (5 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |
| 109 | Kota Probolinggo | #BP FASILITASI SERTIFIKASI PRODUK UKM | masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi Halal produk untuk daya saing usaha (5 UKM) | Disetujui dan dilanjutkan pembahasan TAPD | dapat diakomodir dengan sifat kepesertaan dan harus sesuai kewenangan provinsi serta memperhatikan ketersediaan anggaran |

Tabel 2.6

**Usulan kabupaten kota hasil pelaksanaan musrenbang RKPD
Tahun 2022 yang di tidak diakomodir**

| No | KabupatenKota | Usulan | Permasalahan | Status Desk | Catatan Desk |
|----|--------------------|--|---|-------------|----------------------------|
| 1 | Kabupaten Ponorogo | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Belum terpenuhinya sarana prasarana aplikasi untuk pemasaran produk UMKM Rp. 500.000.000 | Ditolak | bukan kewenangan provinsi |
| 2 | Kabupaten Ponorogo | #BP FASILITASI PENGUATAN JARINGAN PEMASARAN/KEMITRAAN PRODUK UKM | Belum tersedianya kawasan untuk PK5 Rp. 715.00.000 | Ditolak | bukan kewenangan provinsi |
| 3 | Kota Malang | #BP PENDAMPINGAN AKSES PEMBIAYAAN FORMAL (PERBANKAN) BAGI UKM | Pengusaha di sektor UMKM membutuhkan bantuan modal sebagai sarana mengembangkan usahanya. Untuk itu dibutuhkan lembaga resmi pemberi pinjaman kepada para pengusaha tersebut. | Ditolak | bukan kewenangan provinsi. |

Tabel 2.7

Dukungan perangkat daerah dalam pokok-pokok pikiran Dewan

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD | TANGGAPAN/PENJELASAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|----|---|---|-----------------------------------|--|--|---|---------------|
| | | | | DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| 1 | Mendorong penguatan basis ekonomi kerakyatan dan pengembangan sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM), Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan harus tetap menjadi prioritas utama pembangunan ekonomi Jawa Timur; | Merupakan Prioritas Provinsi Jawa Timur pada RPJMD 2019-2024 pada nawa bhakti Jatim Berdaya | Dinas Koperasi dan UKM | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | 3.181.500.000 |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD | TANGGAPAN/PENJELASAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|----|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---------------|
| | | | | DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| 2 | Melakukan agenda program dan kegiatan: (i) Peningkatan basis produksi UMKM dan Pesantren yang berjalan terpadu; (ii) memperkuat hubungan koperasi dan UMKM-Pesantren yang mandiri dan berdaya saing melalui mekanisme pembiayaan yang kompetitif, baik dalam skala <i>banking system</i> maupun yang <i>non bankable</i> ; (iii) memfasilitasi lahirnya generasi milenial di sektor koperasi dan UMKM serta penguatan peran Pesantren-pesantren di Jawa Timur; (iv) membuka trading house untuk Koperasi maupun Pesantren dan UMKM khususnya di sektor agrobisnis, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, industri kreatif; dan (v) bantuan permodalan, promosi produk, dan intervensi pembiayaan melalui mekanisme yang transparan dan peningkatan kualitas produksi. | Dukungan melalui Program Prioritas salah satunya One Pesantren One Product | Dinas Koperasi dan UKM | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 497.500.000 |
| 3 | Mengurangi beban financial masyarakat, termasuk kredit UMKM kepada perbankan atau lembaga keuangan yang lain dengan skema pembebasan angsuran bunga dan pokok dalam beberapa bulan dan diganti dengan pembayaran biaya administrasi saja setiap bulannya. Hal ini harus dimotori oleh bank daerah Jawa Timur untuk masyarakat Jawa Timur. | Dukungan melalui fasilitasi pembiayaan | Dinas Koperasi dan UKM | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 614.484.000 |

| NO | POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD | TANGGAPAN/PENJELASAN | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | PAGU ANGGARAN |
|----|---|--|-----------------------------------|--|---|--|---------------|
| | | | | DILAKSANAKAN PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH | | | |
| 4 | Konsep OPOP (One Pesantren One Produk) yang telah berjalan, tidak mampu mendorong berkembang dalam pemasaran serta tidak menjamin pesantren untuk memiliki produk yang berdaya saing kuat karna pendampingan mutu yang kurang. Maka skemanya harus dilakukan LINKAGE antara pesantren dengan perusahaan besar dalam memproduksi barang atau jasa serta memacu terciptanya produk produk baru yang berkualitas dan laku dipasaran | Dukungan melalui Program Prioritas salah satunya One Pesantren One Product | Dinas Koperasi dan UKM | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 497.500.000 |
| 5 | Dalam rangka revitalisasi dan normalisasi perekonomian rakyat kecil di Jawa Timur, kami mengusulkan dilakukan penguatan sektor UMKM melalui optimalisasi Bank UMKM maupun Bank Jatim dalam pemberian dana pinjaman modal (<i>loan agreement</i>) bagi para pelaku UMKM di Jawa Timur. | Dukungan melalui fasilitasi pembiayaan dan pemberdayaan UMKM | Dinas Koperasi dan UKM | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | 614.484.000 |
| 6 | Mengingat jumlah pesantren di Jawa Timur berjumlah ribuan. maka ini potensi bagi pemerintah untuk diajak berkontribusi di Bidang pembangunan ekonomi kreatif yang tercentra di pesantren dengan melibatkan Kiai, santri, Alumni dan simpatisan. Pemerintah perlu Mendorong dan memfasilitasinya. | Melalui Program OPOP | Dinas Koperasi dan UKM | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 497.500.000 |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan nasional.

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan nasional telah diterjemahkan melalui Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yaitu Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang diarahkan pada delapan arah kebijakan yang meliputi :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim
2. Peningkatan kualitas SDM Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan penanganan disertai peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industry dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Adapun terhadap urusan Koperasi dan UMKM masuk pada arah kebijakan keempat yaitu mendorong pemulihan dunia usaha yang dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM yang ditandai dengan pencapaian :

- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,5%
- b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9 – 4,2%
- c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76 – 6,06 Miliar

- d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%
- e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp 1.279 triliun

Sasaran dan prioritas penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui lima arahan utama Presiden sebagai berikut :

1. Pembangunan sumber daya manusia, membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global
2. Pembangunan infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3. Penyederhanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan omnibus law, terutama menerbitkan Undang – Undang Cipta Kerja
4. Penyederhaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang Panjang dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia

Dalam rangka mendukung arahan tersebut, diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
Koperasi dan UMKM masuk dalam agenda pembangunan ini yang diturunkan ke dalam Program prioritas **Penguatan kewirausahaan, UMKM, dan Koperasi** dengan Kegiatan prioritas :
 - a. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha mikro kecil dan Usaha menengah besar
 - b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha

- c. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi, dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan public

Berikut merupakan turunan target kinerja Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasar hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 sebagai berikut :

| Kinerja | INDIKATOR KINERJA URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|---|---|---|---|
| Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dan Modern | 000 - Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi | 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP |
| | | 2.17.02.1.01 - Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi |
| | | 2.17.02.1.01.01 - Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam |
| | | 2.17.02.1.02 - Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi |

| Kinerja | INDIKATOR KINERJA URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|--|---|--|---|
| | | 2.17.02.1.02.01 - Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |
| | | 2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang Berkualitas |
| | | 2.17.03.1.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi |
| | | 2.17.03.1.01.01 - Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat |
| | | 2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | Persentase koperasi sehat |
| | | 2.17.04.1.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya |
| | | 2.17.04.1.01.01 - Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi |
| Mewujudkan UMKM dan Wirausaha Naik Kelas yang mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global | 002 - Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 003 - Terasilitasinya UKM yang Berpotensi Masuk ke Dalam Rantai Pasok dan Ekspor | 2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi |
| | | 2.17.06.1.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan |
| | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan |
| | | | Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha |
| | | | Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran |
| | | 2.17.06.1.01.01 - Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha |

| Kinerja | INDIKATOR KINERJA URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |
|---------|---|--|---|
| | | 2.17.06.1.01.02 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |
| | 002 - Meningkatnya Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal | 2.17.07 - PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | Persentase UKM yang telah diberdayakan |
| | | 2.17.07.1.01 - Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan |
| | | | Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan |
| | | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran |
| | | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha |
| | | 2.17.07.1.01.01 - Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan |
| | 004 - Pertumbuhan Wirausaha | 2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | Persentase UKM yang telah dikembangkan |
| | | 2.17.08.1.01 - Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM |
| | | | Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha |
| | | 2.17.08.1.01.01 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |
| | | 2.17.08.1.01.02 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM | Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum |

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Perubahan Tahun 2019-2024. Berikut merupakan target tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur tahun 2023 :

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

| Misi (RPJMD Th 2019 – 2024) | Tujuan | | | Sasaran | | |
|---|---|---------------------------------------|--------|---|-------------------------------------|--------|
| | Uraian | Indikator | Target | Uraian | Indikator | Target |
| Mewujudkan Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah | Meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur | Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur (%) | 2,50% | Meningkatnya Nilai Tambah Bruto K-UKM Binaan | Nilai Tambah Bruto KUMK Binaan (Rp) | 3,8 T |
| | | | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP | 82,71 |

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

Tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa Timur dengan indikator Pertumbuhan PDRB KUMKM Jawa Timur yang dihitung dengan formula $(\text{PDRB KUMKM Jatim Tahun } n - \text{PDRB KUMKM Jatim tahun } (n-1)) \div \text{PDRB KUMKM Jatim th. } (n-1) \times 100\%$ dengan catatan nilai PDRB yang digunakan adalah nilai Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Indikator tujuan tersebut menjadi indikator kinerja daerah urusan Koperasi dan UMKM yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2019 – 2024.

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, maka ditetapkan dua sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatkan Nilai Tambah Bruto K-UKM dan Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran pertama Meningkatkan Nilai Tambah Bruto K-UKM merepresentasikan kinerja sesuai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan Koperasi dan UKM dengan indikator Perkembangan Nilai tambah bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang nilainya diperoleh dari hasil survei terhadap Koperasi dan UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

Pandemi covid 19 menyebabkan terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur sehingga menyebabkan perubahan asumsi dalam penghitungan proyeksi persentase pertumbuhan PDRB (Nilai tambah bruto) yang dihasilkan oleh

koperasi dan UMKM di Jawa Timur. Perubahan target dengan asumsi bahwa pemulihan ekonomi sebagai akibat dampak pandemi Covid - 19 berlangsung hingga tahun 2024. Perubahan tahun 2020 merupakan angka sementara hasil penghitungan survei nilai tambah bruto Koperasi dan UMKM di Jawa Timur

Sedangkan sasaran kedua yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merepresentasikan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang didasarkan pada hasil penilaian SAKIP yang terdiri dari aspek perencanaan sebesar 30 persen, pengukuran kinerja 25 persen, pelaporan kinerja 15 persen, evaluasi internal 10 persen, dan capaian kinerja sebesar 20 persen. Perubahan target nilai evaluasi implementasi SAKIP tahun 2021 – 2024 berdasar pada capaian tahun 2020 yang telah melampaui target, sehingga dinilai perlu untuk dilakukan penyesuaian pada target di tahun – tahun selanjutnya. Kedua indikator sasaran tersebut selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasar pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2019 - 2024, Terdapat Tujuh Program Pembangunan dan Satu Program Rutin, dengan masing – masing terdapat Enam kegiatan di dalamnya. Ketujuh Program Pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam dengan sasaran program untuk Melakukan Fasilitasi pengajuan izin usaha simpan pinjam Koperasi
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dengan sasaran program untuk Melakukan Pengawasan atas kelembagaan dan kegiatan usaha Koperasi
- 3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi dengan sasaran program untuk Melakukan pengawasan atas kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam / Usaha Simpan Pinjam Koperasi

- 4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pelatihan
- 5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan pada aspek kelembagaan Koperasi serta meningkatkan kualitas produk dan usaha koperasi, perluasan akses pembiayaan bagi koperasi, serta perluasan akses pemasaran produk koperasi
- 6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan sasaran program untuk Meningkatkan pemberdayaan UKM pada aspek kelembagaan, produksi, perluasan akses pembiayaan, dan perluasan akses pasar produk UKM
- 7) Program Pengembangan UMKM dengan sasaran program untuk Meningkatkan kualitas produk UKM serta peningkatan kualitas pemasaran produk UKM.

Sedangkan Satu Program Rutin yang bersifat Kesekretariatan yaitu Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Di dalamnya terdapat enam kegiatan yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|-----------------------------|--|---|---|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2.17.0.00.0.00.01.00 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | |
| 21702 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | | 1 Indeks Kepuasan Pelayanan Izin USP dan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas USP | Jawa Timur | Persen | 87 | 800.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | | |
| 21702101 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Jumlah penerbitan izin USP - Koperasi | Jawa Timur | Unit | 35 | 400.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 88 | 1.236.340.000 |
| 2170210101 | Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1(Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam | Jawa Timur | Unit Usaha | 20 | 400.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 40 | 618.170.000 |
| 21702102 | Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam koperasi | Jawa Timur | Persen | 100 | 400.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 180 | 618.170.000 |
| 2170210201 | Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Terfasilitasinya Pembukaan Kantor CabangCabang Pembantu dan Kantor Kas KoperasSimpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jawa Timur | Unit Usaha | 25 | 400.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 330 | 618.170.000 |
| 21703 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | | 1 Persentase Koperasi yang Berkualitas | Jawa Timur | Persen | 63 | 1.103.993.480 | PAD dan Block Grant | | 64% | 1.000.970.000 |
| 21703101 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Persentase pemeriksaan danpengawasan koperasi | Jawa Timur | Persen | 45 | 1.103.993.480 | PAD dan Block Grant Rokok | | 46% | 1.000.970.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------|--|--|---|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2170310101 | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | 1 Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Pemberian Manfaat ke pada Anggota KUKM dan Masyarakat | Jawa Timur | Dokumen | 56 | 1.103.993.480 | PAD dan Block Grant Rokok | | 320 | 1.000.970.000 |
| 21704 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | | 1 Persentase koperasi sehat | Jawa Timur | Persen | 22 | 609.437.520 | PAD dan Block Grant Rokok | | 23% | 769.590.000 |
| 21704101 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya | Jawa Timur | Persen | 27 | 609.437.520 | PAD dan Block Grant Rokok | | 30% | 769.590.000 |
| 2170410101 | Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Terlaksananya Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | 1 Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi | Jawa Timur | Unit Usaha | 25 | 609.437.520 | PAD dan Block Grant Rokok | | 135 | 769.590.000 |
| 21705 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | | 1 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan | Jawa Timur | Persen | 96 | 1.016.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok DAK Non Fisik | | 97 | 677.239.200 |
| 21705101 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Persentase jumlah pengelola koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian | Jawa Timur | Persen | 32 | 1.016.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 33,00% | 677.239.200 |
| 2170510101 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | Jawa Timur | Orang | 500 | 1.016.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 215 | 677.239.200 |
| 21706 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI | | 1 Persentase Koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi | Jawa Timur | Persen | 69 | 13.537.121.850 | PAD dan Block Grant Rokok | Termasuk anggaran hibah untuk Koperasi | 70 | 22.861.350.000 |
| 21706101 | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | 1 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan | Jawa Timur | Persen | 30 | | PAD dan Block Grant Rokok | | 30 | 22.861.350.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------|--|---|---|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| | | | 2 Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | Jawa Timur | Persen | 24 | | | | 46% | |
| | | | 3 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan | Jawa Timur | Persen | 44 | | | | 32% | |
| | | | 4 Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan usaha | Jawa Timur | Persen | 31 | | | | 46% | |
| 2170610101 | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Terwujudnya Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 1 Jumlah Unit Usaha yang Memenuhi Standarisasi dan Restrukturisasi Ysaha | Jawa Timur | Unit Usaha | 300 | 1.100.000.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 90 | 17.273.020.000 |
| 2170610102 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 1 Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | Jawa Timur | Unit Usaha | 1.333 | 12.437.121.850 | PAD dan Block Grant Rokok | | 180 | |
| 21707 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | | 1 Persentase UKM yang telah diberdayakan | Jawa Timur | Persen | 33 | 39.030.838.400 | PAD dan Block Grant Rokok | Termasuk anggaran hibah untuk kelompok masyarakat | 34 | 19.928.180.000 |
| 21707101 | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | | 1 Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi legalitas kelembagaan | Jawa Timur | Unit | 75 | 39.030.838.400 | PAD dan Block Grant Rokok | | | |
| | | | 2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran | Jawa Timur | Unit | 350 | | | | 100 | 19.928.180.000 |
| | | | 3 Jumlah UKM yang diberi dukungan fasilitasi pembiayaan | Jawa Timur | Unit | 720 | | | | 375 | |
| | | | 4 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi penguatan usaha | Jawa Timur | Unit | 350 | | | | 725 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------|--|---|---|--------------------|------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| 2170710101 | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | 1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | Jawa Timur | Unit Usaha | 2240 | 39.030.838.400 | PAD dan Block Grant Rokok | | 375 | |
| 2170710102 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan | 1 Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan | Jawa Timur | Orang | - | - | DAK Non Fisik | | - | - |
| 21708 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM | | 1 Persentase UKM yang telah dikembangkan | Jawa Timur | Persen | 33 | 4.991.095.750 | PAD dan Block Grant Rokok | | 34 | 6.401.178.000 |
| 21708101 | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | | 1 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | Jawa Timur | Unit | 150 | 4.991.095.750 | PAD dan Block Grant Rokok | | 150 | 6.401.178.000 |
| | | | 2 Jumlah UKM yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM | Jawa Timur | Unit | 250 | | | | 250 | |
| | | | 3 Jumlah UKM yang bermitra | Jawa Timur | Unit | 75 | | | | 80 | |
| 2170810101 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | 1 Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi | Jawa Timur | Unit Usaha | 620 | 4.763.603.000 | PAD dan Block Grant Rokok | | 600 | 6.401.178.000 |
| 2170810102 | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM | Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan literasi hukum dan bantuan penyelesaian perkara bagi pelaku UMKM | 1 Jumlah pelaku UMKM yang memahami literasi hukum | Jawa Timur | Orang | 250 | 227.492.750 | PAD DAK Non Fisik | | | |
| XXX01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | 1 Persentase indikator program yang tercapai | Jawa Timur | persen | 100 | 38.697.846.996 | PAD | | 100 | 39.167.286.800 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------------|---|---|---|--|------------|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| | | | 2 | Persentase realisasi anggaran | Jawa Timur | persen | 100 | | | | 100 | |
| | | | 3 | Indeks profesionalitas ASN | Jawa Timur | persen | 74 | | | | 75 | |
| XXX01101 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah | Jawa Timur | Dokumen | 4 | 1.677.154.768 | PAD | | 4 | 1.540.267.000 |
| | | | 2 | Jumlah dokumen pelaporan perangkat daerah | Jawa Timur | Dokumen | 4 | | | | | |
| XXX0110101 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jawa Timur | Dokumen | 4 | 716.745.022 | PAD | | 5 | 714.000.000 |
| XXX0110102 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD | 1 | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 7.563.442 | PAD | | 1 | 12.108.000 |
| XXX0110103 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 7.563.442 | PAD | | 1 | 8.619.000 |
| XXX0110104 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPASKPD | 1 | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 4.063.442 | PAD | | 1 | 6.156.000 |
| XXX0110105 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 4.063.442 | PAD | | 1 | 6.156.000 |
| XXX0110106 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jawa Timur | laporan | 5 | 908.254.978 | PAD | | 5 | 755.000.000 |
| XXX0110107 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jawa Timur | laporan | 3 | 28.901.000 | PAD | | 3 | 38.228.000 |
| XXX01102 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 1 | Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan | Jawa Timur | laporan | 1 | 26.668.867.732 | PAD | | 1 | 29.551.326.000 |
| XXX0110201 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 1 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Jawa Timur | Orang / Bulan | 1 | 25.504.748.000 | PAD | | 12 | 28.360.360.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|------------|---|--|---|---|------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| XXX0110202 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jawa Timur | Dokumen | 12 | 522.288.000 | PAD | | 12 | 607.000.000 |
| XXX0110203 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 12 | 561.572.001 | PAD | | 12 | 534.186.000 |
| XXX0110204 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | Jawa Timur | Dokumen | 12 | 7.509.478 | PAD | | 12 | 12.192.000 |
| XXX0110205 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jawa Timur | Laporan | 1 | 7.022.223 | PAD | | 1 | 3.048.000 |
| XXX0110206 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | 1 | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 44.327.145 | PAD | | 1 | 17.825.000 |
| XXX0110207 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jawa Timur | Laporan | 12 | 17.201.846 | PAD | | 12 | 13.615.000 |
| XXX0110208 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1 | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 4.199.039 | PAD | | 1 | 3.100.000 |
| XXX01105 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | 1 | Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian | Jawa Timur | Dokumen | 2 | 1.560.831.096 | PAD | | 2 | 1,806,548,000 |
| XXX0110501 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | 1 | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jawa Timur | Unit | 1 | 182.548.585 | PAD | | 1 | 129,924,000 |
| XXX0110502 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | 1 | Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan | Jawa Timur | Paket | 1 | 260.069.996 | PAD | | 2 | 188,900,000 |
| XXX0110503 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 1 | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jawa Timur | Dokumen | 2 | 970.501.600 | PAD | | 1 | 1,125,000,000 |
| XXX0110504 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 1 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 650.000.000 | PAD | | | 88,724,000 |
| XXX0110509 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Jawa Timur | Orang | 210 | 346.259.500 | PAD | | 210 | 274,000,000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | |
|------------|---|--|--|--------------------|---------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif |
| XXX01106 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa | Jawa Timur | dokumen | 2 | 2.481.182.218 | PAD | | 2 | 1.130.578.000 |
| XXX0110601 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jawa Timur | Paket | 1 | 26.137.095 | PAD | | 1 | 27.352.000 |
| XXX0110602 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jawa Timur | Paket | 4 | 621.062.464 | PAD | | 2 | 298.782.000 |
| XXX0110603 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | 1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Jawa Timur | Paket | 2 | 53.987.999 | PAD | | 1 | 27.430.000 |
| XXX0110605 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | 1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Jawa Timur | Paket | 1 | 224.289.400 | PAD | | 1 | 193.000.000 |
| XXX0110606 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 1 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Jawa Timur | dokumen | 1 | 15.264.600 | PAD | | 1 | 20.120.000 |
| XXX0110607 | Penyediaan Bahan/Material | Tersedianya Bahan/Material | 1 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | Jawa Timur | Paket | 2 | 59.877.250 | PAD | | 1 | 7.798.000 |
| XXX0110608 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jawa Timur | Laporan | 2 | 177.099.500 | PAD | | 1 | 83.276.000 |
| XXX0110609 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jawa Timur | Laporan | 4 | 1.676.361.245 | PAD | | 1 | 472.820.000 |
| XXX01108 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana | Jawa Timur | Dokumen | 1 | 1.814.155.186 | PAD | | 1 | 4.057.067.800 |
| XXX0110801 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jawa Timur | Paket | 1 | 10.000.000 | PAD | | 1 | 10,465.000 |
| XXX0110802 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Jawa Timur | Laporan | 12 | 1.064.505.146 | PAD | | 12 | 1.282.000.000 |
| XXX0110803 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Jawa Timur | Laporan | 2 | 108.951.000 | PAD | | 1 | 72.140.000 |
| XXX0110804 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Jawa Timur | Laporan | 4 | 2.599.574.120 | PAD | | 2 | 2.692.462.800 |
| XXX01109 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1 jumlah laporan aset tetap yang terpelihara | Jawa Timur | dokumen | 1 | 678.325.000 | PAD | | 2 | 1.081.500.000 |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Kinerja | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Rencana Tahun 2023 | | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024 | | |
|--------------|--|---|---|--|-----------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | Lokasi | Satuan | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif | |
| XXX0110901 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | Jawa Timur | Unit | 7 | 217.100.000 | PAD | | 1 | 190.500.000 |
| XXX0110902 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Jawa Timur | Unit | 8 | 289.569.000 | PAD | | 2 | 274.000.000 |
| XXX0110906 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 1 | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jawa Timur | Unit | 9 | 253.675.000 | PAD | | 2 | 187.000.000 |
| XXX0110909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Jawa Timur | Unit | 2 | 284.921.000 | PAD | | | |
| TOTAL | | | | | 99.526.264.000 | | | | | | 92.042.134.000 | |

2 430.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal maupun untuk pemenuhan pelayanan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Jawa Timur Perubahan Tahun 2019-2024 yaitu mendukung terwujudnya capaian pada Misi pertama yaitu Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.

4.1 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH YANG MENDUKUNG PRIORITAS PROVINSI

Prioritas perangkat daerah yang mendukung prioritas provinsi adalah sebagai berikut :

Table 4.1 Program Kegiatan Yang Mendukung Program Prioritas Provinsi Dan Program Icon Gubernur Tahun 2023

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI | NAWA BHA KTI | URAIAN KEGIATAN PRIORITAS | PROGRAM NOMENKLATUR | KEGIATAN NOMENKLATUR | SUB KEGIATAN NOMENKLATUR | SUMBER PENDANAA N | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|--|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--------------------|
| Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder | Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi | Millenial Job Center | Bhakti 2 - Jatim Kerja | - Fasilitasi foto produk dan kualitas kemasan - Fasilitasi katalog digital - Peningkatan kualitas kewirausahaan talenta | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | PAD Block grant Pajak | 2.343.310.000 |
| | | | Communal Branding | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Fasilitasi merek produk KUKM | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | PAD Block grant Pajak | 780.760.000 |
| | | | One Pesantren One Product | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Penguatan kelembagaan Koperasi pondok pesantren (Koppontren) | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat | PAD Block grant Pajak | 7.807.690.000 |
| | | | | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Pelatihan Kompetensi SDM Pengelola Koppontren | Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | PAD Block grant Pajak | |
| | | | | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | - Sertifikasi produk koppontren dan alumni pesantren -Fasilitasi merek produk koppontren dan alumni pesantren | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PAD Block grant Pajak | |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI | NAWA BHAKTI | URAIAN KEGIATAN PRIORITAS | PROGRAM NOMENKLATUR | KEGIATAN NOMENKLATUR | SUB KEGIATAN NOMENKLATUR | SUMBER PENDANAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------|---|--|---|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | | | |
| | | | | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | - Perluasan akses pembiayaan untuk Kopontren - Perluasan akses pemasaran produk kopontren dan alumni pesantren | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PAD Block grant Pajak | |
| | | | Revitalisasi Koperasi | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Restrukturisasi usaha Koperasi | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PAD Block grant Pajak | 1.171.160.000 |
| | | | | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Restrukturisasi usaha Koperasi | Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PAD Block grant Pajak | |
| | | | | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Pengawasan Koperasi | Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada | PAD Block grant Pajak | |

| PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PROGRAM PRIORITAS NASIONAL | PROGRAM ICON/ PROGRAM PRIORITAS PROVINSI | NAWA BHAKTI | URAIAN KEGIATAN PRIORITAS | PROGRAM NOMENKLATUR | KEGIATAN NOMENKLATUR | SUB KEGIATAN NOMENKLATUR | SUMBER PENDANAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|--------------------|--------------------|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Anggota dan Masyarakat | | |
| | | | Kemitraan UKM dan BUMDesa | Bhakti 7 - Jatim Berdaya | Kemitraan pembiayaan UKM dan BUMDesa | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | PAD Block grant Pajak | 78.070.000 |

4.2 PRIORITAS PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur juga merencanakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan prioritas perangkat daerah yang tidak mendukung Prioritas Provinsi namun mendukung tercapainya indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Provinsi

| URAIAN KEGIATAN PRIORITAS | PROGRAM NOMENKLATUR | KEGIATAN NOMENKLATUR | SUB KEGIATAN NOMENKLATUR | SUMBER PENDANAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|--|--|--|--|------------------|--------------------|
| Subsidi Program Prokesra melalui Bank UMKM Jatim | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | PAD | 20.000.000.000 |
| Pemberdayaan UKM Dekranasda | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | PAD | 1.750.000.000 |
| Promosi Produk UKM | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | PAD | 1.000.000.000 |
| Pelatihan dan Inkubator Bisnis | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan | Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan | PAD | 750.000.000 |
| Pendampingan akses permodalan bagi Koperasi | Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | PAD | 500.000.000 |
| Pelatihan Kompetensi SDM UKM | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | PAD | 1.000.000.000 |
| Peningkatan kualitas Produk melalui Standardisasi produk UKM | Program Pengembangan UMKM | Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | PAD | 800.000.000 |

BAB V

PENUTUP

Rencana kerja (renja) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

2. Komitmen tersebut selanjutnya diharapkan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang akan ditandatangani di awal tahun, baik di tingkat Eselon II, III, IV, dan Staf.
3. Akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 untuk mendukung efektivitas pelaksanaannya.

5.2 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, selanjutnya Renja Tahun 2023 akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**DISKOP
UKM**
PROV JATIM

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TIMUR**